



## Diminta APH Tegas Selidiki Dugaan Pungli Sertifikat PTSL di Kelurahan Bawasalo Pangkep

**MUH. HASYIM HANIS, SE, S.Pd, C.L.E - PANGKEP.KWRI.OR.ID**

Jun 16, 2023 - 10:50



*Di Bawasalo, biaya pungutan pada tahun 2019 - 2022 puluhan warga menyeter dengan nilai diduga bervariasi mulai dari Rp. 250.000 hingga Rp. 700.000 namun tidak semua sertifikat warga diterbitkan.*

PANGKEP- Terkait pungutan biaya sertifikat PTSL di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep diduga kuat salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di Bawasalo, biaya pungutan pada tahun [2019 - 2022](#) puluhan warga menyetor dengan nilai diduga bervariasi mulai dari Rp. [250.000](#) hingga Rp. [700.000](#) namun tidak semua sertifikat warga diterbitkan.

Hal itu dibenarkan warga setempat sebagai narasumber dan korban saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

"Iya benar, kita bayar [500.000](#) sertifikat belum terbit dan saya siap jadi saksi jika hal ini masuk ke ranah hukum para pelaku pungutan liar ini," ucap Saibe warga Bawasalo dan juga sebagai korban. (14/06/2023).

Penting diketahui, Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Handoko yang juga selaku LSM dan warga Segeri berharap kepada pihak APH penyelidikan harus serius menangani permasalahan ini, karna hal ini merugikan orang banyak.

"Kami minta kepada pihak APH yang menurut informasi sudah turun melakukan penyelidikan terkait pungutan biaya sertifikat PTSL di Kelurahan Bawasalo serius menangani masalah ini. Kami bersama LSM lainnya sudah berkoordinasi untuk memantau dan mengawasi pergerakan APH dan sasarannya sebagai pelaku," harap dan tegas Handoko. Jumat (16/06/2023).

Ditempat terpisah, Pengurus DPW JNU Sulsel Muh. Hasyim, SE, S.Pd juga berharap jika APH sudah turun melakukan penyelidikan diminta serius menangani masalah ini karna menyangkut kepentingan masyarakat yang diduga ada oknum melakukan pungutan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan itu merupakan tindakan extra ordinary crime.

(JNU)